

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : RDP Komisi I DPR-RI dengan KASAU
Rapat ke :
S i f a t : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 19 Pebruari 2007
P u k u l : 09 .00 WIB
Pimpinan Rapat : DR. Yusron Ihza, LLM
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
T e m p a t : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
A c a r a : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh KASAU
3. Tanya jawab
4. Penutup.
Hadir Anggota : 44 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : KASAU, Sdr. Marsekal TNI Herman Prayitno beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KASAU pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2007 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sdr. DR. Yusron Ihza, LLM dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

1. Hingga kini di beberapa daerah masih seringkali terjadi sengketa tanah antara TNI AU dengan masyarakat. Sengketa itu telah menimbulkan disharmoni dan ketegangan antara anggota TNI-AU dengan masyarakat setempat. Terkait dengan masalah ini, Komisi I DPR RI minta KASAU membentuk tim khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah antara TNI-AU dengan masyarakat di Rumpin Bogor, Komisi I DPR RI akan memfasilitasi dan memediasi TNI-AU dengan masyarakat dan instansi pemerintah terkait agar tercapai penyelesaian yang komprehensif.

2. Mengingat masih banyak aset tanah milik TNI-AU yang belum ditertibkan (belum bersertifikat), terbengkalai dan belum ditangani/dimanfaatkan secara optimal, komisi I DPR RI minta agar KASAU segera menyelesaikan kepastian hukum (sertifikasi) aset-aset tersebut, terutama aset tanah yang bermasalah (berstatus sengketa).
3. Upaya penertiban beberapa rumah dinas (Rumdis) TNI-AU yang dihuni oleh para purnawirawan TNI-AU sampai sekarang masih terus dilakukan. Komisi I DPR RI minta KASAU agar secepatnya menyelesaikan masalah Rumdis termasuk pengosongan dari para penghuninya (para purnawirawan). Komisi I DPR RI juga minta agar penertiban (pengosongan) Rumdis dilakukan dengan cara damai, manusiawi, bermartabat dan tetap memperhatikan kebutuhan tempat bagi para penghuni lama (purnawirawan).
4. Komisi I DPR RI minta TNI-AU agar rencana pembelian Alutsista strategis, terutama pembelian pesawat tempur Sukhoi dan lain-lain, terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan benar-benar dipertimbangkan secara matang agar sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Komisi I DPR RI juga minta agar rencana pembelian Alutsista strategis TNI-AU dibicarakan dengan komisi I DPR RI terutama tentang jenis, type dan reabilitynya (sesuai dengan kondisi Indonesia). Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan dan pembelian Alutsista dilaksanakan secara transparan dan *accountable*.
5. Komisi I DPR RI minta TNI-AU agar kerjasama pembelian Alutsista TNI yang menggunakan fasilitas KE, terutama Alutsista yang strategis dengan sejumlah negara, diikuti dengan kerjasama di bidang *technology*. Sehingga, Indonesia dapat menyerap teknologi (*transfer of technology*) pertahanan dari negara lain.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

KETUA RAPAT,

DR. YUSRON IHZA, LLM